

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan kegiatan yang seringkali diasumsikan dengan hal yang baik, membangun atas dasar mensejahterakan masyarakat yang dikategorikan miskin atau dalam upaya perbaikan dari yang sebelumnya. Dewasa ini, program pembangunan banyak digencarkan di negara-negara dunia ketiga, yang dianggap miskin dan perlu dimajukan. Maka mereka sebagai negara-negara maju atau kita kenal dengan istilah negara dunia pertama memberikan dorongan kepada negara-negara miskin dan berkembang supaya mereka dapat bersanding dengan negara maju, yaitu dengan cara mendanai prosesnya pembangunan (baca: memberikan pinjaman untuk pertumbuhan ekonomi).

Pembangunan atas dasar kedermawanan negara-negara maju yang terjadi pada negara-negara dunia ketiga secara kasat mata ialah upaya mengentaskan kemiskinan, mereka fokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu cara yang harus dilalui ialah melakukan pembangunan yang sifatnya material, seperti membuka keran pasar bebas selebar-lebarnya dengan alasan agar terciptanya lapangan pekerjaan, memperbaiki infrastruktur yang ada guna memperindah dan memperbagus suatu wilayah sehingga diasumsikan dapat menyedot para turis dan menghasilkan devisa bagi negara.

Padahal, kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang mendaku sebagai filantrop tidak lain hanyalah topeng belaka. Jeremy Seabrook menyatakan bahwa pembangunan yang ada hanyalah “konstruk ideologis, berakar pada momen historis di mana konsep pembangunan itu dirancang”¹ yakni perancangan pembangunan dalam rangka *mengcounter* ideologi sosialisme yang tidak mengakomodir privatisasi sarana-sarana produksi. Sedangkan pembangunan versi negara maju ialah pembangunan neoliberal yang kapitalistik, Seabrook menyebut ini sebagai Neo-imperialisme dikarenakan pembangunan yang dilakukan mengandaikan peminjaman hutang yang dikucurkan oleh organisasi-organisasi dunia milik swasta seperti IMF, ADB, World Bank, dan WTO untuk melakukan pasar bebas², yang kemudian berimplikasi pada kemiskinan negara-negara yang meminjamnya karena sang peminjam menciptakan krisis hutang³.

Konstruk ideologis (pembangunan) juga tidak hanya sebagai objek untuk menerapkan imperialisme gaya baru, melainkan juga sebagai sarana bermain bagi mereka yang beruang. Misalnya pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh setiap pemerintah di berbagai negara berkembang untuk menyedot turis dan mendapatkan devisa. Menurut Seabrook, “Dunia yang menjadi tempat bermain orang kaya didesain agar terlihat indah dan mempesona”⁴ sekali lagi, untuk memanjakan mereka yang memiliki uang.

Indonesia sebagai negara dunia ketiga, menjadi salah satu negara korban ilusi “pembangunan” yang banyak melakukan perbaikan, didanai oleh IMF dan World

¹ Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global*. Yogyakarta: Resist Book. Hlm. 70

² *Ibid* Hlm. 74

³ *Ibid*. Hlm. 75

⁴*Ibid* Hlm. 13

Bank. Sehingga Indonesia mau tidak mau harus menerima konsekuensi, yaitu tereksplotasinya sumber daya entah itu alam atau manusia karena mereka bebas melakukan investasi di bumi pertiwi. Pembangunan ini bisa berupa alih fungsi lahan yang tadinya hamparan sawah atau hutan yang subur berganti rupa menjadi lautan pohon kelapa sawit pembuatan pabrik serta seperangkat alat penunjangnya seperti pembangunan jalan tol dan rel kereta yang dapat mempermudah proses distribusi pasar. Tidak lupa juga pembangunan *airport*. Dan hal yang sangat kentara ialah pembangunan lokasi pasar. Biasanya terletak di perkotaan, dengan sengaja diciptakan agar akumulasi modal tetap terjaga, karena dengan ditempatkannya di pusat kota, menjadi tempat strategis agar barang cepat laku di pasaran karena mudah dijangkau.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembangunan saat ini tidak terlepas dari cengkraman kapitalisme, dikatakan demikian karena jika kita memakai kacamata ekonomi politik, kita dapat melihat secara jelas pembangunan yang dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk dapat memetakan hal tersebut, terdapat 3 pertanyaan dasar yang dapat memperlihatkan proyek pembangunan yang dilakukan apakah untuk rakyat, atau untuk korporat?. Ashgar Ali Engineer⁵ menyebutkan tiga pertanyaan yang dapat membantu yaitu *pertama* pembangunan tersebut ditujukan untuk siapa?, *kedua* dalam rangka apa pembangunan itu dilakukan?, dan *ketiga* bagaimana cara melakukan pembangunan tersebut?.

⁵ Engineer, Ashgar Ali .2009. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 24

Berangkat dari tiga pertanyaan yang ditawarkan, kita akan mendapatkan jawabannya sebagai pembuktian. Misalnya pada akhir tahun 2018, sebagaimana dilansir CNN⁶ telah terjadi pembangunan bandara internasional yang berlokasi di Majalengka yang menghabiskan tanah subur yang luas. Padahal, masyarakat tidak membutuhkan bandara karena yang mereka butuhkan ialah tanah sebagai lumbung pangan. Sudah barang tentu bahwa pembangunan tersebut bukan diperuntukkan bagi rakyat, melainkan ada kuasa lain tak kasat mata yang menghendaknya dalam rangka akumulasi kapital. Yang menjadi sangat penting ialah cara melakukan pembangunan tersebut, yang melegalkan perampasan lahan, merampas hak hidup manusia. Sumber pangan yang dulu mereka andalkan dan rumah yang mereka huni kini harus diberangus demi kepentingan mereka, para pemodal.

Begitupun dengan pembangunan rumah deret yang terjadi di kota Bandung tepatnya di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang juga terilusi oleh pembangunan yang baik yang akan menjadikan warga Bandung sejahtera. Mengukur kesejahteraan dari lahiriah semata, bahwa Bandung adalah kota yang sangat cantik, rapih tata ruangnya bersih dari wilayah kumuh, sehingga dapat menyedot orang-orang untuk mengunjunginya, entah itu hanya untuk sekedar bermain menikmati indahnya kota maupun kawasan wisata alamnya.

Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, yang terkenal dengan bapak walikota dengan julukan ramah HAM pada masa jabatannya, pemerintah Kota Bandung mengencarkan program KOTAKU untuk memperlancar apa yang

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830125502-20-154805/benteng-terakhir-sukamulya-melawan-gempuran-penggusuran> (diakses 07 Januari 2019)

dikehendaknya tersebut, yaitu pembangunan rumah deret. Alasan yang beliau sampaikan pada pihak media, sebagaimana dilansir Kompas⁷ ialah untuk meningkatkan kapasitas pemukiman warga Bandung yang akan memakan ruang / tanah seluas 5.000 meter, yang kini ditempati oleh masyarakat yang dianggap sebagai wilayah kumuh dan tidak layak huni. Sehingga diperlukan rekonstruksi dengan cara melakukan program KOTAKU.

Program KOTAKU ialah program dalam rangka mengentaskan kawasan kumuh di perkotaan, sebagaimana dilansir HumasBandung⁸ bahwa program tersebut dilakukan sejak tahun 2016 dengan luas yang awalnya mencapai 1.457 hektar, pada 2017 menyisakan 1.242 hektar dan kini pada tahun 2018 sebanyak 699 hektare yang perlu digarap. Dede Kahiyat selaku Koordinator KOTAKU menargetkan pada tahun 2021 wilayah kumuh telah bersih, alias mencapai titik 0% luasnya. Tak aneh, jika saat ini begitu banyak proyek mengatasnamakan pembangunan namun meminggirkan kemanusiaan, menghilangkan hak-hak manusia yang justru seharusnya dijaga.

Seorang peneliti kaum urban, Frans Ari Prasetyo yang melihat kegagalan dalam proyek ini menyatakan dalam artikelnya *Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung*, bahwa status lahan yang ada di kampung Balubur, Tamansari belum jelas statusnya karena menurutnya masih berstatus lahan negara bebas dan belum diberikan pada pemerintah kota maupun warga. Namun Walikota tetap melakukan penggusuran dan langsung melalui tahap sosialisasi tanpa ada konsultasi dengan

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2017/10/30/18360011/alasan-ridwan-kamil-bangun-rumah-deret-di-tamansari> (Diakses pada 4 Agustus 2018)

⁸ <http://humas.bandung.go.id/humas/berita/2018-07-06/kotaku-targetkan-2019-kota-bandung-bebas-kawasan-k> (Diakses pada Desember 2018)

warga. Sosialisasi disampaikan sebagaimana tercanang dalam SK DPKP3 No. 538.2/1325A/DPKP3/2017 mengenai penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi, dan pelaksanaan pembangunan rumah deret. Hal ganjil lainnya yaitu tidak adanya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan sudah seharusnya lahan yang selama ini dipakai warga sejak 1950 menjadi hak milik warga karena termaktub dalam UU jika sudah dipelihara selama 20 tahun maka ialah yang berhak mendapatkan haknya.⁹

Senada dengan itu, Ahmad Azka Fahriza mengemukakan dalam artikelnya *Kampung Kota Merekam dan Kisah Perlawanan Orang-orang Terpinggirkan*¹⁰ bahwa problem penggusuran di perkotaan “Adalah akibat dari kontradiksi internal dalam kapitalisme” pembacaannya terhadap situasi penggusuran di perkotaan terpengaruhi oleh David Harvey.

Dalam Artikelnya yang berjudul *Right to the City* Harvey¹¹ mengatakan dalam proses pembangunan di perkotaan, ada suatu kuasa, bagaimana ia dibuat dan pembuatan kembalinya, yang telah jauh lebih lama dikonsentrasikan untuk kepentingan surplus. Hal ini memperlihatkan bahwa perkotaan dan seluk-beluknya tidak terlepas dari fenomena kelas, ia berada di bawah naungan kapitalisme. Pembangunan yang semakin menjamur di perkotaan dalam upaya urbanisasi merupakan hal yang terinter-koneksi satu sama lainnya.

Selain mal-prosedur dan kegagalan lainnya yang disampaikan Frans dan Ahmad Azka serta Harvey mengenai keterlibatan kapitalis dalam pembangunan di

⁹ Forum Solidaritas. 2018. Harlah Satu Tahun Tamansari Melawan. Bandung

¹⁰ Kampung Kota Merekam (ed.1. 2017). Hlm.6

¹¹ Harvey, David. 2012. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. New York: Verso Hlm. 6

perkotaan, proyek rumah deret bertentangan dengan beberapa aturan tertulis, bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi pada pembangunan dan pemberdayaan yang seharusnya melibatkan perempuan. Beberapa aturan ini dirangkum oleh Sri Wiyanti Eddyono¹² di antaranya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Komentarnya; UU No.7 Tahun 1984 tentang ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas partisipasi dan keadilan; UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang antara lain berasaskan keadilan dan pemerataan; UU No.26 tahun 2007 tentang tata ruang yang mengatur dalam mengatur dalam penataan ruang untuk memperhatikan perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan; kebijakan dan komitmen pemerintah untuk pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya goal 1 penghapusan kemiskinan dan goal 5 tentang keadilan gender.

Selanjutnya kesalahan adanya penggusuran yang tak ramah gender tersebut juga bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya mengenai perumahan yang layak memiliki prinsip yang menjamin hukum agar setiap orang terlindungi dari penggusuran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya, ketersediaan layanan berupa fasilitas dan infrastruktur, dan keterjangkauan harga bagi segenap lapisan masyarakat.¹³

¹² Eddyono, Sri Wiyanti dkk .2017. *Kertas Kebijakan: Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: SCN-CREST. Hlm. 4

¹³ *Ibid*

Pembangunan rumah deret yang mengandaikan adanya penggusuran sudah barang tentu selain memberangus hak manusia sebagai kaum miskin kota, juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sebagai kelompok yang memiliki ketertindasan ganda. Pasalnya perempuan merupakan kelompok yang sudah tergenderkan memiliki peran yang lebih besar di ranah domestik / rumah. Dalam masyarakat, perempuanlah yang memiliki akses penuh terhadap rumah, keluarga dan anak-anaknya. Sehingga jika terjadi penggusuran, maka perempuanlah yang merasakan kecemasan lebih dari siapapun.

Bagi perempuan (implikasi dari adanya konstruksi gender), tanah/rumah memiliki nilai budaya dan sosial dan tidak hanya sebagai nilai ekonomis¹⁴, maka yang harus ia pikirkan ialah bagaimana ia harus hidup dan mempertahankan kehidupan generasi selanjutnya, Sebagaimana pernyataan seorang perempuan yang kerap disapa Teh Eva yang mempertahankan rumahnya Taman Sari “*Rumah adalah bagaimana karakter anak-anak kita terbentuk. Kita hidup di sini bukan hanya untuk hari esok, tapi kita sadar bahwa anak-anak kita nantinya harus punya rumah juga. Maka dari itu, apa yang kita miliki sekarang harus diperjuangkan untuk anak cucu.* ...”¹⁵

Penindasan berlipat yang dirasakan perempuan sebagaimana ungkap Pujiriyani¹⁶ bahwa ketika terjadi penggusuran maka perempuan harus menanggung beban yang lebih berat secara sosial, ia harus bekerja lebih berat untuk memenuhi

¹⁴ Wahidah Rustam. 2013. *Standar Aturan Perlindungan Perempuan Untuk Kebijakan, Program dan Proyek Iklim*. Solidaritas Perempuan. Hlm. 9

¹⁵ Forum Solidaritas 2018 Harlah Satu Tahun Tamansari Melawan. Bandung

¹⁶ Pujiriyani, dkk. 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.. Hlm.139

kebutuhan, menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal, memiliki peran baru sebagai manajer keuangan keluarga dan tentunya meningkatkan kekerasan terhadap perempuan karena frustrasi.

Selain itu, berpeluang memperlebar keran penindasan, sebagaimana catatan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa ketidakadaannya bukti perempuan dalam akses terhadap tanah maka perempuan tidak bisa mengakses pelayanan pemerintah, hak pilih, pendidikan bagi anaknya, tunjangan kesehatan dan sebagainya. Sekaligus juga tidak dapat mengakses hak sipil politik sesmisal keamanan, partisipasi, hak atas informasi serta ekonomi sosial dan budaya. Selain itu, berpeluang juga pada adanya kekerasan terhadap perempuan yang lebih jauh¹⁷

Senada dengan hal di atas, Heru Suprpto¹⁸ dalam tulisannya yang berjudul *Perempuan Miskin Kota di Hadapan Neoliberalisme* menyatakan bahwa perempuan miskin kota memiliki ketertindasan berstandar ganda. Satu sisi ia dihadapkan pada budaya patriarki yang menindas yakni perempuan miskin kota tidak terlepas dari budaya yang ada disekitarnya yang mengamini perempuan sebagai tokoh utama dalam hal mengurus rumah tangga, segala beban kerjanya ditanggung sendirian oleh seorang istri, dialah yang memikirkan segalanya apa yang berkaitan dengan kerumahtanggaan.

Sisi lainnya, ia dihadapkan pada persoalan ekonomi politik yang belakangan ini semakin mencarut-marut kehidupan rakyat miskin, sehingga memaksa perempuan untuk berkecimpung di ranah publik, dan pada akhirnya

¹⁷ Komnas Perempuan Hlm.16

¹⁸ Suprpto, Heru. *Perempuan Miskin Kota di Hadapan Neoliberalisme*.

menjerumuskan ia pada beban kerja ganda. Perempuan bekerja dikarenakan penghasilan suami mereka dirasakan tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang membludak, mulai dari biaya sehari-hari misalnya untuk makan dan sekolah anak. Banyak dari mereka yang menjadi buruh, kemudian ada juga yang justru membuka warung di rumahnya sendiri, memanfaatkan lingkungannya, bahkan sampai ada yang memanfaatkan tubuhnya sendiri guna mendapatkan rupiah. Penggusuran atau akuisisi tanah adalah cara yang di dalamnya terdapat perlakuan kekerasan HAM khususnya bagi perempuan, terdapat kekerasan gender, mengabaikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.¹⁹

Berdasarkan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perempuan dan kaitannya dengan pembangunan yang mensaratkan penggusuran, menjelaskan ketertindasan perempuan yang multidimensional/interseksional. Ibarat suatu peribahasa yang sudah tak asing di telinga “Sudah basah, tertimpa hujan” begitulah keadaan perempuan, sudah tertindas semakin tertindas ketika terjadi penggusuran.

1.2 Identifikasi Masalah

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program pembangunan dalam mengentaskan kekumuhan, di mana kepadatan penduduk akibat laju urbanisasi menjadi salah satu faktornya. Selain itu pembangunan menata kota yang ideal dengan gaya perumahan berbentuk vertikal (rumah deret) merupakan solusi

¹⁹ Pujiriyani, dkk. 2014 *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press. Hlm.182

yang ditawarkan, selain mengatasnamakan estetika kota tetapi juga sebagai wadah membludaknya populasi di Kota Bandung.

Padahal, pembangunan rumah deret sendiri merupakan bentuk dari menguatnya kapitalisme karena mensyaratkan adanya metropolitanisasi sebagai central akumulasi modal yang diselenggarakan Pemkot, hal ini juga dilakukan dengan cara yang tidak semestinya sebagai kota yang diberi gelar ramah HAM, yaitu dengan menggusur.

Dengan dicaploknya tanah berarti merampas kehidupan, Terlebih lagi perempuan memiliki kerekatan dengan tanah dan rumah yang dihuninya. Hal tersebut membuat pengalaman tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang publik dari pada di rumah / ranah domestik. Sehingga jika saja terjadi perampasan lahan, perempuanlah yang paling menderita.

Keadaan perempuan tersebut dikondisikan, oleh budaya patriarki yang dengan sengaja mendomestifikasi perempuan, keadaan dunia pertama yang mendominasi negara dunia ketiga, keadaan kelas yang menindas kelas buruh/kaum miskin kota, ras dan juga situasi politik dengan berbagai kebijakannya yang tidak ramah gender.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan perempuan miskin kota di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?
2. Bagaimana mekanisme akses, kontrol, partisipasi perempuan serta manfaat pembangunan rumah deret di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat dari perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan perempuan miskin kota di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui mekanisme akses, kontrol, partisipasi perempuan serta manfaat pembangunan rumah deret di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

1.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas yang menjadi fokus kejadian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.2.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Bidang Sosiologi untuk memahami konflik kelas dan kaitannya dengan gender di masyarakat, terlebih lagi konflik yang terjadi adalah konflik agraria yang memperkaya ilmu pengetahuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.2.2 Kegunaan Praktis

Selain memiliki kegunaan teoritisnya, penelitian ini memiliki kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan untuk warga Tamansari RW 11

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat perjuangan, bahwa tanah adalah milik rakyat yang jika terjadi pengusuran berarti merampas kehidupan dan merupakan bentuk pemiskinan perempuan, sehingga harus tetap melawan dan mempertahankannya.

2. Kegunaan untuk Pemerintah Pusat

Penelitian ini berguna bagi Pemerintah Pusat sebagai referensi dalam menentukan kebijakan dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan. Dan agar Pemerintah Pusat selalu melakukan pengawasan terhadap beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pemda atau Pemkot di setiap daerahnya.

3. Kegunaan untuk Pemerintah Kota Bandung

penelitian ini berguna bagi Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan evaluasi bahwa tidak setiap permasalahan solusinya adalah pembangunan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menyoroiti ketertindasan perempuan di ranah konflik agraria (pembangunan rumah deret) seperti yang telah dijelaskan di atas menurut David Harvey bahwa pembangunan di perkotaan tidak terlepas dari cengkraman kapitalisme, terlebih lagi Seabrook melihat ini (pembangunan) sebagai proses akumulasi modal yang dilakukan dunia pertama pada dunia ketiga. Maka tidak saja analisis kelas yang peneliti gunakan, melainkan juga analisis gender yang diusung oleh para feminis yang dapat dipakai sebagai pisau pembedah, khususnya analisis feminis yang melihat struktur sebagai penindas. Upaya melihat bagaimana dampak sosial ekonomi dan budaya yang dirasakan perempuan di bawah berbagai struktur kuasa yang menindas seperti kelas, elit politik, dan patriarki. untuk itu, peneliti menggunakan beberapa kecanggihan berfikir para feminis yang menyatukan berbagai variable tersebut (interseksionalitas), *Pertama* peneliti menggunakan Vandana Shiva dijadikan sebagai basis teori, *kedua* Maria Mies dan ketiga teori yang diusung Linda Peake mengenai perkotaan dan kaitannya dengan gender.

Vandana Shiva dalam karyanya yang berjudul *Bebas dari Pembangunan*²⁰ menjelaskan bagaimana pembangunan yang kita anggap baik, universal, produktif dan positif ternyata tidak seperti adanya, ia justru memproduksi suatu penindasan gender, sangat berdampak buruk terhadap perempuan, dikarenakan pembangunan adalah seperangkat nilai maskulin yang diterapkan pada bumi, merusak nilai

²⁰ Shiva, Vandana (1997) *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

femininitas yaitu melindungi dan merawat. Hal ini tentu saja implikasinya pada kerusakan secara sosial.

Menurutnya pembangunan tak lain adalah bentuk lain dari kolonialisme, karena dalam lintas sejarahnya diperuntukkan bagi surplus kapital yang digenjut oleh para kolonial, hususnya negara-negara barat pada negara-negara dunia ketiga pada masa itu.

Lain halnya dengan saat ini, meskipun pembangunan tetap sama “untuk memperbaiki” dan kepentingan *surplus*, akan tetapi praktik-praktik tersebut mengalami pengalihanganan, yang pada mulanya dilakukan kolonial sekarang dilakukan negara dengan alasan memperbaiki taraf ekonomi rakyatnya dengan cara menggsusur ruang hidup sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kota saat ini.

Pembangunan baginya tidak lain hanyalah upaya dalam menyingkirkan perempuan, alam dan budaya yang ada serta penjajahan dengan corak ideologi patriarki Barat. Karena sejak manusia tergenderkan perempuanlah yang lebih dekat dengan kehidupan domestik dan alam. Sehingga jika terjadi pembangunan yang bercorak patriarkal barat, perempuanlah yang pertama menderita.

Keadaan perempuan yang dekat dengan ruang domestik tersebut dibuat secara sengaja. Mereka dikondisikan memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, seperti kita tahu bahwa perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah daripada di luar atau area publik. Inilah yang dianggap sebagai budaya patriarki, dimana laki-laki yang mendominasi perempuan, dan mereduksi sepaik terjang perempuan hanya dalam cakupan rumah tangga, *housework*.

Maka untuk melihat keadaan sosial secara makro di bawah kapitalisme global, peneliti membutuhkan teori lain dari seorang feminis sosialis Maria Mies yang mengenalkan istilah *housewifization* dalam karyanya *Patriarchy and Accumulation on A World Scale* ²¹. Meskipun penaklukan perempuan menjadi properti laki-laki di ranah keluarga memang datang jauh sebelum era kapitalisme, yakni datang pada zaman barbarisme tingkat tinggi²², akan tetapi kehadiran kapitalismelah yang justru semakin melanggengkan keberadaan patriarki, untuk kepentingan akumulasi modal.

Saat kapitalisme bercokol dan patriarki mengakar secara kuat di masyarakat, mereka menciptakan relasi sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan, tujuannya tak lain sebagaimana Shiva jelaskan terlebih dahulu, untuk kepentingan akumulasi kapital. Cara yang dilaluinya adalah menciptakan dualisme antara tugas-tugas publik yang seringkali dilakukan oleh laki-laki dan privat yang diemban perempuan.

Sebagai aktor yang lekat dengan ruang domestik, perempuan memiliki status *unpaid-wages*. Sedangkan laki-laki yang bekerja di ranah publik (sebagai buruh) memiliki upah atau *paid-wages*. Padahal jika ditelisik, perempuan seharusnya memiliki upah, karena kerja-kerjanya tersebut merupakan pra-kondisi dan merupakan bagian dari surplus kapital. Mies sebut ini sebagai *housewifization* yang dilakukan kapitalis patriarki untuk membuat peran dan kerja perempuan di ranah domestik tidak kasat mata.

²¹ Mies, Maria. 1986. *Patriarchy and Accumulation on A World Scale*. London: Zed Books

²² Engels, Federick. 2004. *Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara*. Kalyanamitra.

Relasi perempuan dan laki-laki di mana pun berada tidak terlepas dari budaya, yang dilanggengkan oleh kapitalis patriarki. Baik desa maupun kota, perempuan memiliki peran-peran domestik berikut yang bernilai ekonomis di ruang publik yang diembannya. Dikarenakan penelitian mengenai pengusuran terjadi di ruang kota, maka teori lain yang dapat membantu melihat secara mikro pembagian tugas perempuan di perkotaan peneliti menggunakan kecanggihan berfikir Linda Peake²³. Ia berhasil memetakan bagaimana kehidupan perempuan di ranah publik dan domestik, yang tentunya berbeda dengan corak kehidupan perempuan masyarakat desa.

Apa yang menjadi penekanan pada analisisnya ialah peran-peran privat dan publik di perkotaan, yaitu yang melingkupi produksi dan reproduksi. Ruang perkotaan yang menjadi lokus di mana reproduksi dan produksi hadir diciptakan secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Apapun yang berkaitan dengan menciptakan suatu barang/jasa untuk ditukarkan (transaksi) mendapatkan uang ialah suatu proses produksi. Adapun yang kaitannya dengan aktivitas pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga seperti kebutuhan kasih sayang, menyiapkan makan dan kebutuhan alat hidup lainnya disebut sebagai tugas reproduksi.

Produksi dan reproduksi di setiap ruang memiliki perbedaan pastinya, untuk perkotaan sendiri, sebagaimana ia paparkan memang perempuan di perkotaan lebih

²³ Little, Jo. Peake, Linda. & Richardson, Pat (1958) *Women in Cities: Gender and the Urban* London: Macmillan Education LTD.

memiliki banyak akses terhadap ruang-ruang publik dan bekerja dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang ada di pedesaan.



Gambar 1.1
Skema Konseptual

